

5. URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat merupakan salah satu dari 6 urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Dalam penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, harus berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku serta memperhatikan budaya dan tata nilai kehidupan masyarakat guna mewujudkan Wonosobo yang maju, mandiri dan sejahtera untuk semua.

Sesuai dengan Tupoksi, penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja. Dalam menjalankan urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja dibantu Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Sekretariat Daerah serta kecamatan dalam rangka pelaksanaan fungsi mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

a. Alokasi Pendanaan

Untuk mendukung urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Kabupaten Wonosobo pada tahun 2020 melalui APBD telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp14.296.070.000,00.

Alokasi anggaran yang digunakan untuk menyelenggarakan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat pada tahun 2020 dapat terealisasi sebesar Rp12.214.870.155,00 atau 85,44%. Capaian program pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.A.5.1

Program, Alokasi dan Realisasi Anggaran Urusan Trantibum dan Linmas Tahun 2020

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
	Belanja Langsung	14.296.070.000	12.214.870.155	85,44
1	Program peningkatan disiplin aparat	191.100.000	139.554.750	73,03
2	Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	3.455.240.000	3.271.941.210	94,70
3	Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	80.000.000	73.700.000	92,13
4	Program pengembangan wawasan kebangsaan	2.652.989.000	1.837.247.600	69,25

III.A.5. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	% Realisasi Anggaran
5	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	732.110.000	644.623.000	88,05
6	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	146.700.000	146.500.000	99,86
7	Program pendidikan politik masyarakat	1.025.000.000	997.777.500	97,34
8	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	6.012.931.000	5.103.526.095	84,88

Sumber: APBD Kabupaten Wonosobo Tahun, 2020 (diolah)

b. Program dan Kegiatan

1) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana Dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja serta untuk melaksanakan tugas kedinasan dan menunjukkan identitas Pol PP, pada tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan pengadaan pakaian dinas Satpol PP beserta perlengkapannya sejumlah 80 paket.

Setiap tahun pada program ini selalu dianggarkan Kegiatan HUT Satpol PP dan Jambore Kegiatan Nasional, namun adanya Pandemi Covid-19 kegiatan ini mengalami *refocusing*, dan hanya dapat dilaksanakan pelatihan untuk persiapan HUT Satpol PP dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan. Dari alokasi anggaran program peningkatan disiplin aparaturnya sebesar Rp191.100.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp139.554.750,00 atau 73,03%.

2) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Guna menjaga kondusivitas, keamanan dan kenyamanan serta kewaspadaan terhadap Ancaman, Tantangan, Hambatan dan Gangguan (ATHG), pemerintah kabupaten Wonosobo melalui program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan telah melaksanakan beberapa kegiatan, diantaranya Patroli Wilayah, Fasilitas Peningkatan Keamanan dan Ketertiban, Peningkatan Kewaspadaan Dini dan Pengawasan Wilayah, Siaga Linmas/PAM Lebaran, Natal dan tahun Baru, PAM tamu/pejabat dan kegiatan Fasilitas PAM Pemilihan Kepala Daerah mengingat pada tahun 2020 Kabupaten Wonosobo menyelenggarakan Pilkada serentak. Dari alokasi anggaran program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan sebesar Rp3.455.240.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp3.271.941.210,00 atau 94,70%.

3) Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal

Program ini sebagai upaya untuk menekan angka kriminalitas dan menjaga kantrantibmas. Kegiatan yang dilakukan di tingkatan kecamatan, melalui penguatan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) serta Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan masyarakat. Dari alokasi anggaran program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal sebesar Rp80.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp73.700.000,00 atau 92,13%.

4) Program pengembangan wawasan kebangsaan

Untuk meningkatkan wawasan kebangsaan, yang menyangkut ideologi pancasila, nilai toleransi dan cinta tanah air, pemerintah kabupaten Wonosobo melibatkan semua unsur organisasi sipil masyarakat dengan memfasilitasi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan pengembangan wawasan kebangsaan, diantaranya fasilitasi ormas, organisasi keagamaan dan FKUB, peringatan hari-hari besar nasional, hari jadi Kabupaten Wonosobo ke-195 dan Ziarah kebangsaan. Ancaman terhadap keutuhan NKRI saat ini bukan berupa Perang, namun lebih kepada ancaman terhadap generasi muda serta menurunnya nilai-nilai luhur budaya bangsa, ancaman budaya asing yang tidak selaras dengan budaya Indonesia, misalnya ancaman Miras, Narkoba. Menyadari hal tersebut melalui Perangkat Daerah Badan Kesbangpol berupaya melakukan Pengembangan Pendidikan Karakter bagi Peserta Didik dan Pendidik, serta pengawasan orang asing.

Kabupaten Wonosobo telah lama dikenal sebagai pusat keberagaman dan toleransi, berbagai upaya telah dilakukan untuk memperkuat nilai-nilai toleransi, diantaranya melakukan Kajian Desa Buntu sebagai Pusat Studi Kebhinekaan. Dari alokasi anggaran program pengembangan wawasan kebangsaan sebesar Rp2.652.989.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp1.837.247.600,00 atau 69,25%.

5) Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan

Menjaga ketertiban dan keamanan menjadi tugas seluruh elemen masyarakat, terutama pada masa Pandemi Covid-19. Tidak hanya Satpol PP sebagai instansi yang melaksanakan penegakan Perda, namun keikutsertaan masyarakat sangat berperan aktif. Pada tahun 2020 melalui program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan telah dilaksanakan kegiatan Penegakan Perda Secara Persuasif dan Penegakan Penerapan Protokol kesehatan. Penegakan perda diantaranya Perda tempat hiburan/karaoke, Perda ijin bangunan ROI jalan, Perda Penertiban BTS yang sudah habis masa berlakunya.

Pada tahun 2020 Satpol PP terlibat dalam Satuan Tugas Covid-19, dengan diberlakukannya Protokol kesehatan selama Pandemi Covid-19, banyak terjadi pelanggaran. Dari hasil Penegakan Penerapan Protokol kesehatan terdapat 13.917 pelanggaran. Penegakan protokol kesehatan ini melibatkan anggota Satpol PP bekerjasama dengan TNI dan Polri.

Dari alokasi anggaran program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan sebesar Rp732.110.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp644.623.000,00 atau 88,05%.

6) Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Penyakit masyarakat atau ketegangan masyarakat, adalah istilah umum yang biasanya dipakai oleh penegakan hukum untuk menyebut ketegangan yang disebabkan oleh sekelompok orang. Salah satu penyakit masyarakat di Kabupaten Wonosobo yang meresahkan masyarakat adalah merebaknya minuman keras dan narkoba. Dalam rangka mengendalikan Peredaran dan Penggunaan Miras dan Narkoba, Sebelum terbentuknya Badan Narkotika Kabupaten (BNK), Kabupaten Wonosobo terus berupaya melakukan pencegahan melalui Penyuluhan Pencegahan Peredaran dan Penggunaan Miras dan Narkoba (P4GN) dan Fasilitasi Kesatuan Aksi Masyarakat Anti Narkotika (KAMA) dan Kesatuan Aksi Pelajar Anti Narkotika (KAPA), serta penyuluhan masyarakat terkait kenakalan remaja dan penyakit masyarakat lainnya.

Dari alokasi anggaran Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) sebesar Rp146.700.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp146.500.000,00 atau 99,86%.

7) Program pendidikan politik masyarakat

Dalam rangka meningkatkan pemahaman dan partisipasi politik masyarakat, pemerintah kabupaten Wonosobo melalui program pendidikan politik telah melaksanakan kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan, Pemantauan dan Pelaporan Pemilihan Kepala Daerah di semua kecamatan dan kelurahan.

Dari alokasi anggaran Program pendidikan politik masyarakat sebesar Rp1.025.000.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp 997.777.500,00 atau sebesar 97,34%.

8) Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam

Dengan ditetapkannya Pandemi Covid-19 sebagai bencana nasional pada tahun 2020, maka anggaran daerah/APBD banyak yang mengalami *refocussing* dialihkan untuk penanganan Pandemi Covid. Upaya untuk mencegah penyebaran dan penanggulangan Pandemi Covid-19 ini telah dilakukan pemerintah kabupaten dengan berbagai kegiatan yang mendukung, diantaranya pencegahan dini dan penanggulangan Covid-19, pelayanan penampungan isolasi komunal pencegahan dan penanggulangan Covid-19 tingkat kabupaten.

Selain keseriusan pemerintah daerah dalam pencegahan penyebaran dan penanggulangan Pandemi Covid-19, juga dilaksanakan kegiatan yang melibatkan masyarakat, yaitu pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana, melalui pelatihan Tim Reaksi Cepat. Tim Reaksi Cepat ini bertugas untuk meninjau lokasi bencana dan melakukan *assesment* agar bisa dilakukan tindak lanjut dari pihak-pihak terkait.

III.A.5. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Dalam rangka fasilitasi kepada perangkat daerah dan kecamatan dalam melakukan penghitungan/pengkajian kebutuhan pasca bencana, melalui BPBD telah dilaksanakan pelatihan jitu PASNA (pengkajian kebutuhan pasca bencana). Dengan pelatihan ini diharapkan perangkat daerah dan kecamatan mampu menghitung kebutuhan pasca bencana.

Dalam meningkatkan upaya penanganan kejadian bencana di Wonosobo telah dilakukan Operasi Tanggap Darurat Bencana sebanyak 39 Operasi Tanggap Darurat Bencana dan Kebakaran dan sebanyak 50 kali penyaluran Bantuan Logistik korban terdampak bencana serta pengadaan logistik dan obat-obatan bagi penduduk di tempat penampungan sementara.

Selain hal tersebut guna mendukung operasional setiap tahun pemerintah kabupaten Wonosobo menganggarkan untuk kegiatan fasilitasi pusat pengendalian operasi penanggulangan bencana (Pusdalops).

Dari alokasi anggaran Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam sebesar Rp6.012.931.000,00 dapat terealisasi sebesar Rp5.103.526.095,00 atau sebesar 84,88%.

c. Capaian Kinerja

Tabel III.A.5.2

Capaian Kinerja Urusan Trantibum dan Linmas

Berdasarkan Indikator RKPD Tahun 2020

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
1	Tingkat partisipasi pemilih	%	79,80%	74,40%	66,25%	89,05	T	75%
2	Prosentase kasus pelanggaran HAM yang dilaporkan dan difasilitasi penyelesaiannya	%	100,00%	100%	100%	100,00	ST	100%
3	Persentase siskamling aktif	%	67%	73%	53%	72,60	S	75%
4	Prosentase FKDM yang aktif	%	100%	85%	85%	100,00	ST	85%

III.A.5. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
5	Persentase lembaga keagamaan dan kemasyarakatan yang telah berbadan hukum indonesia yang mendapat bantuan pemerintah daerah	%	91,67%	81,50%	94,44%	115,88	ST	85%
6	Rasio tempat ibadah per satuan penduduk (jumlah tempat ibadah/jumlah penduduk)x1000		4,435	4,44	4,44	100,00	ST	4,45
7	Persentase patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	%	92%	90%	103%	114,44	ST	90%
8	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan) di Kabupaten/ Kota	%	100%	100%	100%	100,00	ST	100,00%
9	Angka kriminalitas yang tertangani	%	85%	85%	100%	117,65	ST	85,00%
10	Rasio kasus penyakit masyarakat/ PEKAT (pornografi, pornoaksi, penyalahgunaan narkoba, perjudian, prostitusi, dan berbagai jenis praktik asusila) per 1.000 penduduk		0,002	0,005	0,019	-180,00	SR	0,005

III.A.5. **Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat**

No	Indikator Kinerja Program	Satuan	Capaian 2019	2020				Target (RPJMD) 2021
				Target	Capaian	% Realisasi Capaian	Status Capaian	
11	Cakupan Patroli siaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat		1	0,4	0,267	66,75	S	0,4
12	Cakupan rasio petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota		0,95	1,5	1,2	80,00	T	1,5
13	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		0,65	0,74	0,01	1,35	SR	0,74
14	Persentase LINMAS terlatih	%	30%	35%	30%	85,71	T	40%
15	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan		7,04	6,2	3,06	49,35	SR	7,04%
16	Persentase desa siaga bencana	%	8%	62,50%	38,00%	60,80	R	75,00%
17	Persentase sekolah tanggap bencana	%	90%	95%	90%	94,74	ST	100%
18	Capaian pembentukan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada lingkungan dan atau kawasan potensi kebakaran		0	2	0	0,00	SR	2
19	Cakupan pelayanan bencana kebakaran		100%	98,50%	100%	101,52	ST	100%
20	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan WMK		80,64%	70%	81%	115,71	ST	75,00%

Sumber : Kantor Kesbangpol, Satpol PP, dan BPBD Kab. Wonosobo, 2020

Keterangan Status Capaian:

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Simbol	Gradasi Nilai (Skala Intensitas) Kinerja Indikator
1	91 % ≤ 100 %	Sangat Tinggi	ST	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada diatas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja.
2	76 % ≤ 90%	Tinggi	T	
3	66 % ≤ 75 %	Sedang	S	pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal
4	51 % ≤ 65 %	Rendah	R	pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/masih dibawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan
5	≤ 50 %	Sangat Rendah	SR	

Sumber: Skala Nilai Peringkat Kinerja (Permendagri No. 86 Tahun 2017)

Berdasarkan Skala Nilai Peringkat kinerja di atas, maka dapat disimpulkan Capaian Kinerja Program Urusan Trantibum Linmas pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

- Terdapat 20 indikator Kinerja Program urusan trantibum dan linmas
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sangat Tinggi sebanyak 10 (sembilan) indikator,
- Realisasi Kinerja Program Kategori kategori Tinggi sebanyak 3 (tiga) Indikator.
- Realisasi Kinerja Program Kategori Sedang, Rendah dan Sangat Rendah sebanyak 7 (tujuh) Indikator

Berdasarkan data diatas, dari target indikator program RPJMD yang ditetapkan, masih ada indikator yang sangat rendah yaitu Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan dan capaian pembentukan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada lingkungan dan atau kawasan potensi kebakaran.

d. Tindak Lanjut atas Rekomendasi / Catatan DPRD Tahun 2019

Tindak lanjut pelaksanaan program pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat atas rekomendasi/Catatan DPRD Kabupaten Wonosobo terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel III A.5.3.

Tindak Lanjut atas Rekomendasi/ Catatan DPRD

No.	Catatan Kritis	Tindak Lanjut Rekomendasi
1.	Kawasan Alun-Alun yang menjadi ruang publik agar tetap dipertahankan sehingga tidak dijadikan tempat berjualan Pedagang Kaki Lima (PKL).	Pengawasan alun-alun yang menjadi kawasan publik telah dilaksanakan tahun 2019 dan 2020

III.A.5. Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Catatan Kritis	Tindak Lanjut Rekomendasi
2.	Penegakan Perda Tempat Hiburan karena disinyalir ada beberapa tempat hiburan/ karaoke yang masih beroperasi.	Penegakan perda dan tempat hiburan/ karaoke telah diputuskan di Tingkat Mahkamah Agung pada tahun 2020
3.	Penertiban masalah ijin bangunan yang melanggar ROI Jalan.	Penegakan ijin bangunan ROI jalan telah dilaksanakan tahun 2020
4.	Penertiban Menara BTS yang sudah habis masa berlakunya dan menara tower yang didirikan tanpa ijin.	Penertiban BTS yang sudah habis masa berlakunya dilaksanakan pada tahun 2020 dengan koordinasi dengan DPMPTSP Kabupaten Wonosobo
5.	Mewaspada kasus penyakit masyarakat (Peredaran miras dan Narkoba).	Kasus penyakit masyarakat (peredaran miras) telah disidangkan pada tahun 2019 dan 2020
6.	Monitoring terhadap perkembangan paham- paham idiologi dan radikalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila.	Monitoring terhadap perkembangan paham-paham ideologi dan radikalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila telah dilaksanakan pada tahun 2020 dan 2021 berkoordinasi dengan pihak terkait. Keberadaan organisasi dengan paham idiologi dan radikalisme yang tidak sesuai dengan Pancasila ini juga telah dilarang dengan adanya Surat Keputusan Bersama Menteri.

e. Permasalahan dan Solusi

Tabel III.A.5.4

Matriks Permasalahan dan Solusi pada Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No.	Permasalahan	Solusi
1.	Terbatasnya SDM Satpol PP dan petugas Linmas	Memaksimalkan SDM Satpol PP dan petugas Linmas yang ada serta meningkatkan kedisiplinan
2.	Masih terbatasnya prasyarat untuk pembentukan wilayah manajemen kebakaran (WMK) pada lingkungan dan atau kawasan potensi kebakaran.	Penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran
3.	Melemahnya sistem pengamanan lingkungan berbasis pemberdayaan masyarakat (siskamling)	Mengaktifkan kembali dan mengoptimalkan Siskamling yang telah terbentuk
4.	Masih tingginya kasus penyakit masyarakat	Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit masyarakat dengan melibatkan pengawasan dini masyarakat dan tokoh agama maupun tokoh masyarakat